

BAB III

STRATEGI PRESIDEN MOON JAE IN DALAM MENGATASI KRISIS DEMOGRAFI DI KOREA SELATAN

Bagian ini berisi tentang penjelasan secara rinci mengenai strategi pemerintah Korea Selatan di era Presiden Moon Jae In dalam rangka mengatasi krisis demografi di Korea Selatan. Strategi Moon Jae In dapat dianalisis dengan menggunakan *human development theory* atau teori pembangunan manusia.

A. Latar Belakang Strategi Pemerintah Korea Selatan

Krisis demografi di Korea Selatan telah berusaha diselesaikan oleh presiden sebelum Moon Jae In. Presiden Kim Dae-jung pada akhir 1990-an telah mencoba menghadapi perubahan demografis ini. Kim menciptakan Kementerian Kesetaraan Gender (sekarang disebut Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga) untuk meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan yang dibentuk oleh tradisi hierarkis kuno laki-laki berada di atas perempuan. Kementerian tersebut di pemerintahan telah mengeluarkan banyak uang untuk masalah ini. (Roh J. , 2019)

Pada masa pemerintahan Park Geun-hye, beliau mengeluarkan website berisi informasi kelahiran berdasarkan wilayah, seolah-olah

berusaha menggerakkan daya saing dalam hal reproduksi. Strategi tersebut dilaksanakan Park Geun Hye dengan harapan meningkatkan persaingan dalam hal reproduksi antar wilayah. Strategi tersebut tidak berujung baik dengan ditutupnya website tersebut karena keluhan wanita di Korea Selatan yang menganggap Park Geun Hye hanya melihat wanita sebagai “pabrik pembuat bayi”. (Roh J. , 2019)

Pada tahun 2018, pengeluaran pemerintah untuk memerangi angka kelahiran rendah adalah sekitar \$ 25 miliar, Reuters baru-baru ini melaporkan, angka tersebut hampir setengah dari tingkat pengeluaran Korea Selatan untuk bidang pertahanan. Hal tersebut tidak memberi banyak efek perbedaan, sebagian besar karena pemerintah lebih fokus pada penyebab kecil daripada yang lebih besar. Misalnya, pemerintah lebih memusatkan perhatian pada memberikan biaya subsidi terhadap biaya anak. Namun pemerintah tidak menekan bisnis Korea Selatan untuk mempertahankan dan mempromosikan pekerja perempuan. (Levkowitz, 2019)

Dengan media Korea mengklaim baby bust sebagai "risiko yang lebih besar daripada krisis mata uang," Seoul menanggapi dengan menghabiskan sekitar 117 triliun won (\$ 97 miliar) antara 2016 dan 2018 pada langkah-langkah yang bertujuan mengangkat angka kelahiran. Ini termasuk memperkenalkan cuti hamil berbayar, memberikan subsidi untuk

perawatan kesuburan, perawatan medis gratis untuk bayi dan subsidi perawatan anak. (Levkowitz, 2019)

Pemerintah Korea Selatan sebelumnya telah mencoba selama bertahun-tahun untuk memprakarsai kebijakan baru yang dirancang untuk meningkatkan tingkat kelahiran negara itu, termasuk menambah manfaat finansial yang diberikan kepada keluarga dengan anak-anak. Masalahnya adalah bahwa manfaat-manfaat ini tidak mencakup pengeluaran kritis seperti biaya pendidikan dalam masyarakat yang kompetitif seperti Korea Selatan. Masalah lain adalah hambatan yang ada di jalur wanita yang ingin kembali bekerja setelah melahirkan. Pekerjaan paruh waktu untuk ibu yang bekerja, serta pekerjaan yang memungkinkan seseorang bekerja dari rumah, sangat sulit ditemukan di Korea Selatan. (Levkowitz, 2019)

"Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang ramah bagi perempuan, melonggarkan kebijakan imigrasi, dan selanjutnya mengembangkan lingkungan investasi ramah yang mencakup deregulasi dan menciptakan industri baru," kata Hong.

1. Strategi Pemerintah dalam Bidang Ekonomi

Pada masa pemerintahan sebelumnya bentuk finansial dianggap kurang efektif dalam meningkatkan jumlah penduduk di Korea Selatan,

akhirnya pada masa pemerintahan Moon Jae In, pemerintah memangkas anggaran untuk menaikkan angka kelahiran menjadi di bawah \$ 20 miliar. Pada bulan Desember, Komite Presidensial untuk Masyarakat Lanjut Usia dan Kebijakan Kependudukan mengatakan akan mengubah arah untuk fokus pada "meningkatkan kualitas hidup setiap generasi", menurut Yonhap, daripada berfokus pada biaya yang dihadapi oleh orang tua dari anak. Hal yang lebih diutamakan oleh pemerintahan Moon ialah diharapkan akan ada lebih banyak tenaga kerja perempuan yang mempertahankan keinginan untuk memiliki anak. Tujuan berikutnya adalah untuk mendapatkan lebih banyak pria Korea yang mengambil cuti ayah secara dibayar yang secara hukum dapat mereka dapatkan ketika seorang anak lahir. (Ramstad, 2019)

Korea Selatan pada masa pemerintahan Moon Jae In mengumumkan serangkaian langkah-langkah untuk menghapus penyebab mendasar yang dikutip dari penurunan angka kelahiran di negara itu, termasuk tingginya biaya membesarkan anak dan meningkatnya jumlah orang yang memilih untuk tidak memiliki anak. Krisis ini dicoba diselesaikan saat Kim Sang-hee, wakil ketua komite kepresidenan yang bertujuan menangani masyarakat dengan angka kelahiran rendah dan usia lanjut. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan mengatakan rencana baru pemerintah adalah mengubah paradigma

kebijakannya untuk fokus pada peningkatan kualitas hidup setiap generasi dan mengatasi masalah dalam jangka panjang. "Kebijakan ini adalah fokus memberi harapan kepada orang berusia 20-an hingga 40-an dan memastikan bahwa kualitas hidup mereka tidak jatuh ketika memilih menikah dan melahirkan," kata Kim. Kementerian mengatakan negara akan bertanggung jawab atas biaya medis untuk bayi berusia kurang dari satu tahun mulai tahun depan. Pemerintah berencana untuk memberikan manfaat yang sama kepada anak-anak pra-sekolah pada tahun 2025, kata para pembuat kebijakan. Saat ini, pemerintah membayar subsidi bulanan kepada 90 persen keluarga, tidak termasuk golongan penghasilan 10 persen teratas. Manfaat tidak mencakup sekitar 25.000 anak dari 2,53 juta. Mulai tahun depan, manfaatnya akan diperluas ke setiap rumah tangga terlepas dari pendapatan orang tua, dengan rencana jangka panjang untuk meningkatkan subsidi. Dalam upaya membantu pasangan yang sulit hamil, pemerintah akan memperluas subsidi untuk perawatan infertilitas. Kementerian mengatakan penduduk dapat membayar kurang dari 30 persen biaya medis untuk perawatan infertilitas, yang didalamnya termasuk tiga sesi inseminasi buatan dan maksimum empat sesi pemupukan eksternal, mulai tahun depan. (Reuters, 2019)

Mulai paruh kedua tahun depan, orang tua dengan anak-anak di bawah delapan akan

dapat bekerja satu jam lebih sedikit setiap hari sehingga mereka dapat merawat anak-anak mereka. Juga, cuti ayah yang dibayar akan diperluas menjadi 10 hari dari 3 hari saat ini, kata para pejabat. Pemerintah mengatakan juga akan mendorong lebih banyak cuti ayah, dengan tujuan meningkatkan tingkat saat ini dari 13 persen menjadi 20 persen. Lebih banyak pria yang mengambil cuti paternitas saat ini, tetapi jumlah mereka masih sangat sedikit dibandingkan dengan wanita dan angka ini berada jauh di bawah negara maju lainnya, kata para pejabat di Korea Selatan. Kementerian mengatakan akan membangun lebih banyak pusat penitipan anak dengan tujuan mencapai proporsi anak-anak menggunakan taman kanak-kanak dan pusat penitipan anak nasional dan publik sebesar 40 persen tahun depan. (Reuters, 2019)

Presiden Moon Jae-in sebelumnya menetapkan tujuan untuk memperluas dukungan pemerintah untuk orang tua dengan anak-anak, bersumpah untuk menciptakan lebih dari tiga kali lipat proporsi bayi dan balita. Seoul diharapkan fokus untuk memiliki 300.000 bayi baru lahir setiap tahun sebagai gantinya. "Tujuan kami difokuskan pada memelihara 300.000 bayi baru lahir setiap tahun. Sesuai dengan itu, pemerintah bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana setiap rumah tangga dapat memiliki dua anak dengan menurunkan biaya medis dan mengurangi

biaya membesarkan anak," Lee Chang-jun, seorang pejabat komite. (Reuters, 2019)

Selain itu dalam masalah pekerja migran secara global dan historis, pekerja migran telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Mereka terdiri dari tiga persen dari populasi dunia, tetapi berkontribusi lebih dari sembilan persen dari PDB global. Korea Selatan juga telah mengakui pentingnya tenaga kerja migran. Sejak awal 1990-an, negara ini telah mempekerjakan semakin banyak pekerja migran untuk bekerja keras di pabrik-pabrik, di lokasi-lokasi konstruksi dan pertanian. Pada tahun 2016, ada lebih dari satu juta migran yang aktif secara ekonomi. (Reuters, 2019)

Sejak 2010, negara itu telah menawarkan visa tinggal selama lima tahun kepada warga asing yang berinvestasi setidaknya 500 juta won (US \$ 434.000) dalam proyek real estat dan publik yang ditunjuk. Pada akhir lima tahun, peserta dalam Skema Investor Imigran untuk Real Estat dan Skema Investor Imigran untuk Bisnis Publik dapat mengajukan permohonan tempat tinggal permanen. Pada tahun yang sama, pemerintah juga meluncurkan visa berbasis poin untuk migran yang sangat terampil, menawarkan jalur langka ke tempat tinggal permanen yang tidak terikat dengan pernikahan. Dan, pada 2013, pemerintah memperkenalkan visa awal yang berdedikasi, melonggarkan pembatasan yang sebelumnya mengharuskan pengusaha asing

untuk berinvestasi setidaknya 100 juta (US \$ 86.000) di negara itu. (Reuters, 2019)

Hingga masa pemerintahan Moon Jae In kemudahan terus diberikan bagi pekerja migran. Beberapa perbaikan dilakukan sejak 2017 dalam jam kerja yang panjang dan kondisi upah sehingga jumlah pekerja asing Korea Selatan pada tahun 2018 naik 50.000 dari tahun sebelumnya, sebagian besar berkat pekerjaan di bidang manufaktur dan posisi tenaga kerja sementara atau harian. (Reuters, 2019)

Pada tahun 2060, Korea Selatan mungkin membutuhkan sebanyak 15 juta imigran untuk mempertahankan pertumbuhan. Pada tahun 2065, lebih dari 40 persen populasi akan berusia di atas 65 tahun. Saat ini, lima pekerja mendukung satu lansia dengan membayar dana pensiun nasional; dalam 50 tahun, rasionya adalah 1: 1. Dengan konteks ini, pekerja migran adalah solusi jangka panjang untuk defisit demografis Korea Selatan, bukan celah sementara untuk kekurangan tenaga kerja yang akan dibuang kemudian. Pemerintah harus mendukung integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberi mereka jalan menuju kewarganegaraan. (Reuters, 2019)

2. Strategi Pemerintah dalam Bidang Kesetaraan Gender

Kementerian mengatakan akan memfokuskan perubahan kebijakannya pada penciptaan lingkungan kerja yang kondusif bagi

perempuan untuk tetap bekerja bahkan jika mereka memiliki anak. Kebijakan kompatibilitas pekerjaan dan rumah Korea Selatan perlu ditingkatkan lebih lanjut bagi perempuan untuk melanjutkan karir mereka. Menurut data, sekitar 56 persen perempuan berumur 15-64 bekerja di Korea Selatan, dibawah rata-rata OECD yang hampir berada diangka 60 persen, dan 72-75 persen di Denmark dan Swedia, dimana tingkat kelahirannya merupakan salah satu yang tertinggi dinegara maju. Perekrut pekerjaan menyatakan bahwa perempuan muda yang sudah menikah memiliki kesempatan lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan karena adanya diskriminasi. "Diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja masih merupakan masalah serius di masyarakat kita," kata Lee, mencatat kelahiran anak sering kali berujung pada berakhirnya karir kerja bagi pekerja perempuan. (Yonhap, 2018)

Sebelumnya, diluncurkannya Pemerintahan baru pada tahun 1998, Komisi Presiden untuk Urusan Perempuan dibentuk untuk menangani masalah-masalah yang secara khusus melibatkan perempuan. Komisi ini diangkat dan diperluas menjadi Kementerian Kesetaraan Gender pada Januari 2001. Kementerian yang baru ini menetapkan 20 tugas khusus yang harus dicapai dalam enam bidang dasar. Bidang-bidang ini adalah: untuk merevisi dan menetapkan undang-undang dan peraturan yang melibatkan diskriminasi di

sektor apa pun dan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, untuk memfasilitasi pekerjaan perempuan dan memberikan dukungan bagi pekerja perempuan, untuk meningkatkan peluang pendidikan bagi perempuan agar kompetitif di pasar tenaga kerja, untuk memberikan kebijakan kesejahteraan sosial bagi perempuan, untuk mempromosikan keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan sosial termasuk pekerjaan sukarela dan kegiatan organisasi perempuan, dan untuk memperkuat kerja sama organisasi perempuan Korea dengan organisasi perempuan internasional. Kementerian akan terus mencoba untuk menerapkan 20 tugas khusus untuk mencapai kesetaraan gender di Korea Selatan. ((KOIS), 2020)

Presiden Moon Jae-in, mendeskripsikan dirinya sebagai presiden feminis, dengan menguji sudut pandang baru: menunjukkan pada wanita lebih banyak rasa hormat. Pemerintahan Moon telah berupaya untuk mengatasi kesenjangan gender dalam pemerintahan, pemerintah telah menetapkan tujuan-tujuan seperti perempuan bertanggung jawab atas 10 persen posisi di pemerintahan dan 20 persen eksekutif di perusahaan publik pada 2022. Selain itu, Korea Selatan juga mengumumkan rencana untuk menghapus beberapa halangan untuk mempekerjakan perempuan, yang memungkinkan kedua orang tua untuk mengambil cuti orang tua

pada saat yang sama dan memperpanjang cuti ayah yang dibayar. Pengusaha juga mendapat insentif untuk mengizinkan orang tua bekerja lebih sedikit. Presiden Moon Jae In juga memotong jam kerja di Korea dari 68 jam menjadi 52 jam. Perusahaan Samsung juga secara aktif merekrut pekerja wanita dan memiliki lebih banyak karyawan wanita daripada Apple. (Yonhap, 2018)

"Upaya kesetaraan gender sangat tepat untuk menyelesaikan krisis kependudukan," kata Shin Eun-Kyung, seorang ekonom dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. Jika Korea Selatan mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan ke tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki pada tahun 2035, itu akan menimbulkan pertumbuhan PDB riil 7 persen menurut IMF. Angka tersebut merupakan jumlah yang sangat signifikan, karena kira-kira sama dengan apa yang dikeluarkan Korea Selatan untuk perawatan kesehatan. (Reuters, 2019)

3. Strategi Pemerintah dalam Bidang Militer

Penurunan angka kelahiran Korea juga tercermin dalam penurunan tahunan jumlah kandidat yang mengikuti ujian universitas nasional, Tes Kemampuan Skolastik Perguruan Tinggi (CSAT). Jumlah kandidat CSAT pada 2018 lebih rendah hampir 250.000 dari jumlah kandidat pada pertengahan 1990-an, dengan

penurunan hampir 30%. Penurunan jumlah peserta ujian menunjukkan tren lanjutan dalam jumlah siswa potensial, tentara, anggota angkatan kerja, dan konsumen. Penurunan jumlah mahasiswa akan mempengaruhi jumlah insinyur, dokter, dan tentara yang menyediakan layanan penting bagi masyarakat. (Levkowitz, 2019)

Saat ini, semua pria Korea Selatan yang berbadan sehat harus melakukan wajib militer selama sekitar dua tahun. Penurunan populasi akhirnya ikut mempengaruhi sistem pertahanan di Korea Selatan. Angka kelahiran rendah di negara itu kemungkinan akan menyebabkan penurunan jumlah warga pria berusia 20-an menjadi kurang dari 250.000 setelah 2022, dibandingkan dengan sekitar 350.000 pada 2017, menurut data pemerintah. (Tae, 2019)

Karena berkurangnya sumber daya manusia, hal tersebut mendesak pemerintah untuk meningkatkan sistemnya untuk memperoleh personel militer. Jumlah orang yang harus melayani militer diproyeksikan turun menjadi 230.000 pada 2025 sebelum turun menjadi kurang dari 200.000 setelah 2037, dibandingkan dengan 350.000 pada 2018. Korea Selatan berencana mengurangi jumlah pasukan menjadi 500.000 pada 2022 dari 599.000 pada 2018, menurut buku putih pertahanan 2018 yang dirilis pada bulan Januari. Sebagai perbandingan, surat kabar itu menyebutkan jumlah personel aktif-tugas di Korea Utara adalah 1,28 juta. Langkah ini

sejalan dengan reformasi pertahanan di mana pemerintah berupaya mengurangi jumlah pasukan untuk mengatasi lebih sedikit calon wajib militer dan persyaratan layanan wajib yang lebih pendek untuk wajib militer. (Tae, 2019)

Pemerintah berencana untuk memotong jumlah pasukan tetap yang bertugas aktif sambil mereformasi militer dengan cara yang memanfaatkan teknologi seperti drone yang dipersenjatai dan satelit pengintaian. Untuk menutupi kekurangan tenaga kerja di masa depan, Angkatan Darat bersumpah untuk memanfaatkan teknologi terbaru seperti sistem senjata canggih yang akan digunakan untuk perang laser, cyber, dan elektronik, sistem berbasis kecerdasan buatan, sistem artileri super-panjang dan kendaraan penerbangan mobilitas tinggi. (Tae, 2019)

Pihak militer Korea Selatan mengatakan bahwa mereka membentuk sebuah komite ilmu pengetahuan dan teknologi awal tahun ini untuk penelitian dan pengembangan bersama dengan badan-badan pemerintah dan perusahaan-perusahaan pertahanan utama. Berdasarkan hasilnya, mereka akan menyusun persyaratan militer yang terperinci. Sebagai bagian dari upaya tersebut, agen pengadaan senjata meluncurkan proyek untuk mengembangkan sistem senjata laser yang dirancang untuk meluncurkan serangan presisi

terhadap kendaraan udara tak berawak kecil pada tahun 2023. Militer Korea Selatan juga mengamati penyebaran operasional yang disebut "dronebot" sekitar 2021. (Tae, 2019)

Pemerintah juga mempertimbangkan mandat bahwa warga Korea Selatan yang dinaturalisasi harus mengikuti wajib militer. Jumlah orang asing yang dinaturalisasi telah melampaui 10.000 setiap tahun dalam beberapa tahun terakhir, dengan 11.270 pada 2013, 10.924 pada 2015 dan 10.086 pada 2017, menurut data pemerintah. Korea Selatan dalam menghadapi populasi yang menyusut dan sebagai bagian dari inisiatif reformasi berharap untuk menciptakan militer yang lebih kecil namun lebih efektif dan pintar. (Agency, 2019)

B. Pembangunan Manusia dalam Strategi Pemerintah Korea Selatan

Strategi yang digunakan oleh Moon Jae In untuk menyelesaikan krisis di Korea Selatan dapat dianalisis berdasarkan teori *human development*. *Human development* atau pendekatan pembangunan manusia memberikan penjelasan bahwa proses pembangunan, khususnya pembangunan internasional merupakan proses melalui peningkatan kualitas kehidupan manusia bukan hanya sekedar meningkatkan perekonomian suatu negara. Pendekatan ini berfokus pada manusia, kesempatan dan pilihan yang dimilikinya. *Human*

development berasumsi bahwa memperbaiki atau meningkatkan kehidupan manusia akan lebih membawa dampak kesejahteraan dan kemakmuran dibandingkan dengan hanya meningkatkan kemampuan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi saja. Teori pembangunan manusia percaya bahwa pertumbuhan pendapatan hanyalah salah satu alat yang digunakan untuk membangun dan membentuk kehidupan manusia, bukan sebagai tujuan dari pembangunan (UNDP, About Human Development, 2015).

Teori ini kemudian dikembangkan oleh United Nations Development Program (UNDP) untuk memperbaiki konsep analisis sumber daya manusia sebelumnya yang berlandaskan produk domestik bruto atau rata-rata pendapatan perkapita (UNDP, Human Development Report, 1990). Sejumlah premis dasar dari teori pembangunan manusia adalah:

1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya meningkatkan

kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.

4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu: produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan untuk mencapai pembangunan. (UNDP, About Human Development, 2015)

Strategi dalam bentuk ekonomi yang tidak cukup efektif untuk menyelesaikan krisis demografi di Korea Selatan sesuai dengan teori pembangunan manusia, pembangunan tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi saja tapi juga berfokus pada pembangunan sumber daya manusia untuk mencapai skala pembangunan yang lebih baik. Hal tersebutlah yang menjadi poros Moon Jae In untuk mengatasi krisis demografi di Korea Selatan, yaitu dengan mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disana.

Strategi yang dilaksanakan Moon Jae In didasari oleh 2 dimensi yang dicakup oleh *human development*. Dimensi yang dicakup oleh *human development* dibagi menjadi 2 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu secara

langsung meningkatkan kemampuan manusia yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Dimensi yang kedua yaitu menciptakan kondisi untuk pembangunan manusia yang meliputi partisipasi dalam ranah politik, ketahanan lingkungan, perlindungan dan hak asasi manusia, serta kesetaraan gender. Jadi secara keseluruhan, human development mencoba untuk membentuk pembangunan yang berorientasi pada manusia. Setelah semua hal tersebut tercapai dalam pembangunan, maka akan terbuka kesempatan untuk meraih kemajuan pada aspek hidup lainnya. (UNDP, About Human Development, 2015)